

ABSTRAK

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH YANG DIKUASAI MASYARAKAT DESA RENAH KAYU EMBUN YANG BERADA DALAM KAWASAN TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT DI KOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

Dengan adanya Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) tak jarang dianggap sebagai hambatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Masyarakat Desa Renah Kayu Embun yang menguasai dan menduduki tanah Dalam Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat bermula dari semakin meningkatnya kebutuhan ekonomi yang memaksa masyarakat setempat untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat setempat hanya beranggapan bahwa mereka merasa bebas memilih lokasi baru untuk membuka lahan berladang, serta untuk membuka tanah ini mereka bisa mengurangi biaya ketimbang harus membeli tanah yang sudah siap digarap. Namun apa yang dilakukan oleh masyarakat setempat sudah jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumusan masalah dalam tesis ini mengenai bagaimana persepsi kedua belah pihak dan bagaimana penyelesaian sengketa terhadap tanah yang dikuasai terhadap tanah yang dikuasai oleh masyarakat Desa Renah Kayu Embun yang masuk dalam kawasan TNKS.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif dengan menghubungkan data yang satu dengan yang lainnya secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan

Dari persepsi masyarakat yang telah menguasai tanah dalam kawasan TNKS yang beranggapan bahwa tanah yang mereka kuasai tersebut salah satu upaya membantu perekonomian masyarakat setempat, dan kebutuhan akan tanah untuk dijadikan lahan pertanian memang menjadi masalah penting dikalangan masyarakat di Desa Renah Kayu Embun. Antara Pemerintah (Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat) dan Masyarakat yang menguasai tanah dalam kawasan TNKS. Pemerintah tidak menawarkan lahan atau tanah yang bisa dimanfaatkan oleh mereka yang telah telanjur menguasai tanah di kawasan TNKS. Masyarakat hanya diminta untuk meninggalkan tanah yang mereka kuasai tanpa adanya jaminan bagi mereka untuk melanjutkan kesejahteraan memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui kegiatan bertani/berladang.

Perlu diterapkannya sosialisasi kepada masyarakat yang lebih aktif lagi serta kepada anak-anak yang tinggal di sekitar kawasan TNKS dengan harapan agar generasi selanjutnya tidak melakukan perambahan hutan dan penguasaan tanah didalam kawasan TNKS tanpa mempedulikan hukum yang berlaku. sengketa tanah antara pemerintah dalam hal ini Balai Besar TNKS maka sudah seharusnya penegakan pencegahan ataupun penegakan hukum diselesaikan melalui peraturan yang berlaku. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 telah menetapkan sanksi terhadap orang yang melakukan perusakan, penguasaan terhadap kawasan hutan dengan sanksi pidana ataupun sanksi ganti rugi.

Kata Kunci: Sengketa, Tanah, Taman Nasional Kerinci Seblat.

ABSTRACT
RESOLUTION OF LAND DISPUTES RENEWED BY THE COMMUNITY OF
RENAH KAYU EMBUN VILLAGE THAT IS IN THE KERINCI SEBLAT
NATIONAL PARK AREA IN THE CITY OF SUNGAI PENUH
JAMBI PROVINCE

The existence of the Kerinci Seblat National Park (TNKS) is often seen as an obstacle in efforts to improve welfare. The people of Renah Kayu Embun Village who control and occupy the land in the Kerinci Seblat National Park area stems from the increasing economic needs that force local people to work to fulfill their daily needs. Local people only think that they feel free to choose a new location for clearing agricultural land, and to clear this land they can reduce costs rather than having to buy land that is ready to work on. However, what the local people do is clearly in violation of the prevailing laws and regulations. .

The formulation of the problem in this thesis is about the perceptions of both parties and how to resolve disputes over land controlled against land controlled by the people of Renah Kayu Embun Village which are included in the TNKS area.

The approach method used in this research is juridical empirical method. The research specification used is descriptive. The data collection techniques used were library research and field studies. Data analysis techniques use qualitative data analysis methods by linking data with one another systematically. The results showed

From the perception of the people who have controlled the land in the KSNP area, they think that the land they control is one of the efforts to help the local community's economy, and the need for land to be used as agricultural land is indeed an important problem among the people in Renah Kayu Embun Village. Between the Government (Balai Besar Kerinci Seblat National Park) and the community who control the land within the TNKS area. The government does not offer land or land that can be used by those who have already controlled the land in the TNKS area. People are only asked to leave the land they control without any guarantee for them to continue their welfare to fulfill their daily needs through farming / farming activities.

It is necessary to apply socialization to communities who are even more active and to children living around the TNKS area with the hope that the next generation will not carry out forest encroachment and land tenure within the TNKS area without paying attention to the applicable laws. Land disputes between the government, in this case the KSNP Office, should prevent or enforce the law to be resolved through the applicable regulations. Law No. 41/1999 has stipulated sanctions against people who destroy, control forest areas with criminal sanctions or compensation sanctions.

Keywords: Disputes, Land, Kerinci Seblat National Park